

Indonesia Climate Change
Trust Fund (ICCTF)

Laporan Akhir Tahun 2015







Indonesia Climate
Change Trust Fund (ICCTF)

Laporan Akhir Tahun 2015



PENGANTAR



Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dapat mempertahankan kinerja yang baik di tahun 2015. Meskipun baru menjadi lembaga dana perwalian nasional sepenuhnya pada tahun 2015, ICCTF mampu menyalurkan dana untuk program-program penanganan perubahan iklim sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Sepanjang tahun 2015, ICCTF telah mendapatkan dukungan dana dan komitmen dari berbagai mitra pembangunan, termasuk USAID, *United Kingdom Climate Change Unit* (UKCCU), dan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, serta dukungan dana Rupiah Murni dari APBN sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk penanganan perubahan iklim. ICCTF juga terus meningkatkan kemungkinan kerja sama dengan berbagai pihak lainnya, termasuk dengan dunia usaha.

Dana yang masuk ke ICCTF tentu harus disalurkan untuk program penanganan perubahan iklim yang tepat dan sesuai. Di tahun 2015, ICCTF mendanai enam Program Skala Kecil di berbagai lokasi di Indonesia sesuai dengan tiga fokus area, yaitu kegiatan mitigasi berbasis lahan, energi, serta ketahanan dan adaptasi. Majelis Wali Amanat melihat bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi penanganan perubahan iklim. Di konferensi perubahan iklim dunia, *Conference of Parties* (COP) ke-21 di Paris, Prancis, akhir tahun 2015 lalu, negara-negara dunia telah menyepakati untuk mencapai suhu dunia di bawah 2 derajat Celsius. Tentu saja, Indonesia harus memegang peranan penting dalam pencapaian target ini.

Bapak Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan target baru bagi Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030. ICCTF harus siap untuk menjadi lembaga pendanaan yang kuat dan mumpuni dalam mengkoordinasikan dana-dana internasional untuk penanganan perubahan iklim tersebut. Pengembangan kapasitas lembaga akan terus dilakukan. Begitu pula dengan pelaksanaan program yang akan semakin besar dan luas di tahun 2016 dengan semakin bertambahnya dukungan dana di ICCTF. Untuk melangkah ke masa depan, ICCTF harus terus-menerus memperkuat diri bersama dengan seluruh mitra pembangunan. Kami yakin, ICCTF dapat menjawab tantangan itu.

Atas nama Majelis Wali Amanat ICCTF,

Endah Murniningtyas

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas
selaku Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Climate Change Trust Fund/ ICCTF*) merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. ICCTF didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Di tahun 2015, ICCTF terus melanjutkan kegiatan penguatan kelembagaan dan program penanganan perubahan iklim yang telah dilakukan sejak pendirian lembaga di tahun 2009. Dalam periode 2010-2015, ICCTF telah mendanai 18 program penanganan perubahan iklim di berbagai lokasi di Indonesia sesuai dengan tiga area fokus, yaitu kegiatan mitigasi berbasis lahan, energi, serta ketahanan dan adaptasi, dengan mitra pelaksana kegiatan yang meliputi Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan universitas.

PENCAPAIAN UTAMA

1. ICCTF telah mengukuhkan kerangka kelembagaan sebagai lembaga yang sah dalam mengelola inisiatif pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan perubahan iklim dengan reputasi baik di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.
2. Struktur organisasi telah terbentuk, berupa Lembaga Wali Amanat (LWA) ICCTF yang terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanat (PDA) yaitu Bank Mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, MWA dibantu oleh Sekretariat.
3. ICCTF sebagai lembaga dana perwalian telah sepenuhnya beroperasi dan berhasil memilih serta mendanai kegiatan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Indonesia.
4. Pada tahun 2015, ICCTF menerima dukungan dana Rupiah Murni APBN yang berjumlah Rp 15,3 miliar untuk mendukung kegiatan operasional Sekretariat ICCTF dan membiayai enam Program Skala Kecil melalui swakelola.
5. ICCTF juga menerima dukungan dana internasional, yaitu dari Kedutaan Besar Kerajaan Denmark di Indonesia dan *United States Agency for International Development* (USAID). Dana dari Pemerintah Kerajaan Denmark diberikan untuk memperkuat proses seleksi dan pemantauan program-program ICCTF, serta dapat juga digunakan untuk pendanaan Program Skala Kecil. Sementara itu, dana USAID digunakan untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia melalui ICCTF.
6. Setelah menjadi LWA ICCTF, *Standard Operating Procedure* (SOP) lembaga dari *Preparatory Arrangements for ICCTF* (PREP-ICCTF) telah disesuaikan untuk mengikuti mekanisme APBN. Konsep *grant channeling mechanism* kemudian disusun dan disempurnakan dalam bentuk SOP dengan dukungan dari GIZ *Indonesia NAMAs Financing Support* (GIZ INFIS).



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
 I. Tinjauan Bisnis	 1
1. Program	1
1.1. Kegiatan Program Skala Kecil	1
a. Pencapaian Program Skala Kecil 2015	2
1. Mitigasi Berbasis Lahan	3
2. Energi	7
3. Ketahanan dan Adaptasi	12
b. Pembelajaran Program	17
1.2. Pengembangan Area Fokus ICCTF	18
1.3. <i>Call for Proposal 2016</i>	19
1.4. Dukungan ICCTF terhadap <i>Nationally Appropriate Mitigation Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)</i>	19
1.5. <i>Impact Assessment</i>	20
1.6. <i>Gender Mainstreaming</i>	22
2. <i>Fundraising</i> dan Komunikasi	23
2.1. <i>Media Engagement</i>	23
2.2. Partisipasi dalam Acara Nasional dan Internasional	24
2.3. Kunjungan Donor, Media, dan Pemangku Kepentingan	27
2.4. Diskusi mengenai Pendanaan Perubahan Iklim	28
3. Kemitraan	29
 II. Pengembangan Institusi dan Kapasitas Lembaga	 31
1. Status Legal Lembaga	31
2. Pertemuan MWA ICCTF	31
3. USAID Menjadi Anggota MWA ICCTF	32
4. Manajemen Risiko	32
5. Persiapan Pendaftaran <i>Green Climate Fund</i>	33
6. Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat ICCTF	34
7. <i>Joint Review</i> atas Satker MWA ICCTF	36
 III. Informasi Keuangan	 37
 IV. Rencana ke Depan	 38
 Lampiran	 41
1. Program yang Didanai ICCTF 2015	42
2. Pemberitaan mengenai ICCTF	43

I. TINJAUAN BISNIS

ICCTF sebagai lembaga dana perwalian telah sepenuhnya beroperasi dan berhasil memilih serta mendanai kegiatan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2015, ICCTF telah mendanai enam kegiatan Program Skala Kecil melalui swakelola di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta. Program-program ini dilaksanakan setelah melalui serangkaian proses pengembangan area fokus ICCTF yang sesuai dengan informasi dari MWA, termasuk pemilihan dan perencanaan tema, lokasi, dan metode program.

1. PROGRAM

Dalam pengelolaan kegiatan penanganan perubahan iklim, ICCTF memiliki tiga area fokus, yaitu sebagai berikut:

Mitigasi Berbasis Lahan	Energi	Ketahanan dan Adaptasi
Fokus pada upaya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong pengelolaan lahan gambut dan hutan sumber daya nasional	Fokus pada kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan industri	Fokus pada upaya mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, merespons risiko dan ketidakpastian musim/iklim, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam sektor yang paling rentan

1. 1. KEGIATAN PROGRAM SKALA KECIL

Pelaksanaan program skala kecil ICCTF melalui swakelola dimulai secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2015 dengan terpilihnya enam pelaksana swakelola, yaitu Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), LPPM Institut Pertanian Bogor, Politeknik ATMI Surakarta, Konphalindo, Bingkai Indonesia, dan Pilar Indonesia.

Secara keseluruhan, masing-masing pelaksana melakukan pembentukan tim pelaksana program secara swakelola, termasuk perekrutan staf. Namun demikian, pelaksana swakelola juga diharapkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan secara substantif sebagaimana tercantum dalam rencana kerja dan *milestone* yang telah disusun.

Pencapaian Program Skala Kecil ICCTF 2015 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai 95% dari yang telah dianggarkan. Sekretariat ICCTF juga telah mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi karena adanya penyesuaian mekanisme keuangan APBN dengan mengadakan mentoring dan *coaching clinic* bagi para pelaksana swakelola.

a. PENCAPAIAN PROGRAM SKALA KECIL 2015

1) MITIGASI BERBASIS LAHAN

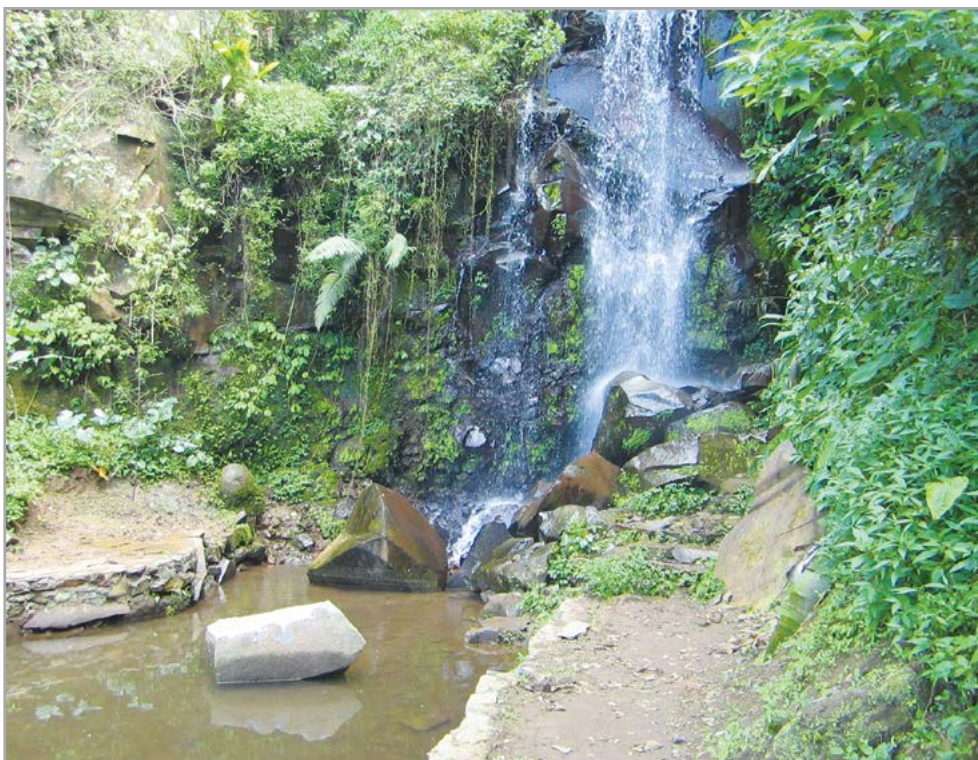


■ Kegiatan:

Pengembangan Model Bisnis Ekowisata di Sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai

Mitra Pelaksana	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)
Lokasi	Kabupaten Kuningan, Jawa Barat





Kegiatan ini bertujuan untuk membangun model bisnis ekowisata di kawasan penyangga Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Model bisnis ekowisata ini mencakup manajemen dan organisasi, penyediaan produk wisata lokal, baik dalam bentuk program dan layanan, pengembangan produk lokal, pemasaran, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan. Aspek lain yang dilaksanakan dalam program ini adalah peningkatan kemampuan/keterampilan bagi masyarakat sekitar dalam mengembangkan bisnis ekowisata

Pencapaian:

- Tersusunnya model pengembangan bisnis ekowisata
- Tersusunnya modul pelatihan pengembangan bisnis ekowisata TNGC di Desa Sagarahieng yang terdiri dari pengembangan wisata daerah, perjalanan wisata, pertanian sehat, dan produk lokal
- Tersusunnya modul pelatihan pengembangan bisnis ekowisata
- Peningkatan kemampuan manajemen bisnis ekowisata bagi masyarakat di sekitar TNGC yang dapat dilihat dari: (a) Dukungan SKPD Kuningan dalam pengembangan bisnis ekowisata TNGC; (b) Perencanaan masyarakat (*community planning*) dengan nama “Usaha Ekowisata Kampung Karuhun Desa Sagarahieng”; (c) Kelembagaan “Usaha Ekowisata Kampung Karuhun Desa Sagarahieng” berupa Koperasi Lingga Buana; (d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok usaha bisnis ekowisata Kampung Karuhun

■ Kegiatan:

Pengembangan Model Percontohan Kebun Energi Terpadu di Lahan Kritis untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat & Mitigasi Perubahan Iklim

Mitra Pelaksana	LPPM Institut Pertanian Bogor
Lokasi	Kecamatan Cidolog, Sukabumi Selatan, Jawa Barat





Kegiatan ini merupakan replikasi dari keberhasilan program ICCTF di Bangkalan, Madura, pada tahun 2014, dengan menggabungkan konsep kebun energi terpadu. Konsep tersebut bertujuan pada peningkatan ekonomi dengan multi-hasil di lahan-lahan kritis Indonesia. Untuk kegiatan ini, multi-hasil yang direncanakan adalah pemanfaatan batang kaliandra untuk *wood pellet*, bunga untuk lebah madu, dan daun sebagai pakan kambing.

Pencapaian:

- Terbangun kebun energi terpadu seluas 1 hektar, lengkap dengan pondok kerja, kandang kambing, lebah madu, dan alat kebun
- Tersusunnya empat modul pelatihan kebun energi terpadu
- Terlatihnya 42 peserta (anggota kelompok tani) dalam manajemen kebun energi terpadu
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta terkait manajemen kebun energi terpadu (hasil *pre-test* dan *post-test*)

Peran kebun energi terpadu terhadap perubahan iklim meliputi: (a) penyerapan CO₂ oleh tanaman kaliandra sebesar 30-60 ton CO₂ /ha/tahun; (b) pengalihan penggunaan minyak tanah/batu bara oleh *wood pellet* dapat mengurangi emisi CO₂ sebesar 75-150 ton/ha/tahun; serta (c) pengurangan emisi CO₂ dapat mencapai 525-1.050 ton CO₂/tahun jika luas dampak mencapai 50 hektar.

2) ENERGI



■ Kegiatan:

Pengembangan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum (PJU)/Smart Street Lighting di Kawasan Pariwisata Jawa Tengah

Mitra Pelaksana	Politeknik ATMI Surakarta
Lokasi	Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah





Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PJU dalam efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta dapat mendukung pengelolaan PJU Kawasan Pariwisata dengan lokasi wisata Kabupaten Karanganyar sebagai area sasaran.

Pencapaian:

- Usulan Rencana Induk Efisiensi dan Pengembangan PJU yaitu mengganti lampu lama PJU ke LED dan memasang meteran di beberapa titik PJU tertentu, dan berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), data titik PJU hasil pemetaan tahun 2015 dianggap legal seluruhnya dengan diperhitungkan biaya untuk legalisasi titik yang belum terdaftar
- Dari hasil perhitungan, dibutuhkan biaya sekitar Rp 2,8 miliar untuk memasang meteran serta mengganti PJU dengan teknologi LED, balik modal kurang dari 5 tahun, penurunan biaya listrik 50% per tahun, dan penurunan emisi gas rumah kaca 14% per tahun.
- Sebanyak 30 operator PJU dan staf DKP mendapatkan pelatihan sistem informasi geografis dan pelatihan efisiensi PJU
- Terbangunnya sistem informasi geografis (SIG) PJU untuk Kabupaten Karanganyar

■ Kegiatan:

Kajian Pengembangan Energi Nabati (Minyak Jelantah) sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan

Mitra Pelaksana	Konphalindo
Lokasi	Jagakarsa, Jakarta Selatan





Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: (a) menyusun demplot percontohan (*pilot project*) dan pengembangan energi nabati (jelantah); (b) mengkaji potensi kalori, ekonomi, sosial-budaya, dan geo-lingkungan untuk energi nabati untuk pengembangan bisnis model skala industri melalui pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian:

- Modul pengolahan jelantah menjadi biodiesel berbasis masyarakat
- Dokumen hasil kajian potensi jelantah menjadi biodiesel berbasis masyarakat
- Dokumen biodiesel/jelantah SNI

3) KETAHANAN DAN ADAPTASI



■ Kegiatan:

Pengurangan Risiko Iklim dengan Informasi Cuaca untuk Masyarakat Pesisir

Mitra Pelaksana	Bingkai Indonesia
Lokasi	Yogyakarta dan Pelabuhan Ratu, Jawa barat





Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan skema pembangunan masyarakat yang tangguh dan beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim melalui penyebaran informasi iklim, cuaca, dan potensi ikan. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pesisir Yogyakarta dan Pelabuhan Ratu.

Pencapaian:

- Sebanyak 91 siswa/guru dan 61 remaja dan pelajar mendapatkan pelatihan dan/atau penyegaran dalam mengakses informasi iklim, cuaca dan potensi ikan
- Sebanyak 82 nelayan di pesisir Yogyakarta dan Pelabuhan Ratu mendapatkan informasi iklim, cuaca, dan potensi ikan

■ Kegiatan:

Pengembangan Mangrove untuk Ketahanan Ekologi-Ekonomi Masyarakat Pesisir

Mitra Pelaksana	Pilar Indonesia
Lokasi	Deli Serdang, Sumatera Utara





Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan wisata (wisata alam/edukasi) dan *bio-resources* hutan *mangrove*. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru pendamping Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dari 15 propinsi serta peningkatan pengetahuan siswa-siswi SMP/SMA mengenai manfaat hutan *mangrove*.

Pencapaian:

- Tersusunnya modul dan dokumen terkait pemanfaatan wisata (wisata alam/edukasi) dan *bio-resources* hutan *mangrove*
- Kegiatan pelatihan pemanfaatan *bio-resource* hutan *mangrove* kepada 70 orang masyarakat sekitar
- Pelatihan kepada 28 guru SMP/SMA/Tenaga Pendamping Sekolah Pantai Indonesia dari 14 provinsi di Indonesia dengan menggunakan modul dari ICCTF
- Sebanyak 100 siswa SMP/SMA mendapatkan pendidikan lingkungan pengenalan potensi hutan *mangrove*

b. PEMBELAJARAN PROGRAM

Pembelajaran dari pelaksanaan program skala kecil melalui swakelola yang menggunakan dana APBN ini telah dirangkum ke dalam satu dokumen pedoman pelaksanaan yang penyusunannya dilakukan bersama-sama oleh ICCTF dan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari GIZ GIZ INFIS.

Pembelajaran dari Program “Pengembangan Demplot Kebun Energi Terpadu di Lahan Kritis Untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat dan Mitigasi Perubahan Iklim”

- **Tingkat dan Pengalaman Masyarakat**

Keberhasilan *demonstration plot* (demplot) kebun energi terpadu ditentukan oleh tingkat pengalaman masyarakat/petani dalam menanam kaliandra, beternak kambing dan lebah madu.

- **Pemasaran dan Akses ke Pasar**

Jaminan pemasaran atas hasil-hasil demplot kebun energi terpadu sangat berperan dalam meningkatkan motivasi para petani untuk membangun kebun energi terpadu. Program ICCTF juga diharapkan bisa menggandeng dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan program.

- **Pemilihan Lokasi**

Lokasi yang ideal meliputi kriteria sebagai berikut: (i) lokasi belum terjangkau oleh listrik atau lokasi yang harga minyak buminya lebih mahal dari wilayah lain; (ii) prioritas terhadap wilayah dengan lahan kritis yang luas yang membutuhkan kegiatan rehabilitasi/reboisasi; (iii) mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani/ yang kehidupannya sangat bergantung pada lahan.

Pengembangan Model Bisnis Ekowisata di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai

Peran masyarakat sangat menentukan, namun komitmen aktor lokal juga penting bagi kelanjutan inisiatif ekowisata. Selain itu, sinergitas lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan implementasi inisiatif tersebut. Kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dinilai sangat esensial, terutama adanya partisipasi dan pendampingan yang dilakukan secara proporsional.

Kajian Pengembangan Energi Nabati (Minyak Jelantah) Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan

Penerapan teknologi ini memerlukan adanya perubahan perilaku sehari-hari masyarakat, karenanya perlu gerakan sosial yang kuat, misalnya dengan mengajarkan masyarakat untuk melakukan pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dengan teknologi yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat umum.

1. 2. PENGEMBANGAN AREA FOKUS ICCTF

Di tahun 2015, ICCTF melakukan serangkaian pertemuan dan kegiatan lapangan bersama Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika (ETI) Kementerian PPN/Bappenas untuk mengeksplorasi kemungkinan sinergi program energi baru terbarukan (*renewable energy*) dan *land-based mitigation*. Pengembangan industri bioetanol untuk bahan bakar nabati yang terintegrasi dengan peningkatan pasokan pakan ternak dan pangan menjadi salah satu usulan kegiatan yang akan menjadi prioritas ke depan bagi Direktorat ETI.

Survei ke lokasi yang potensial juga dilakukan oleh ICCTF dan Direktorat ETI untuk mengidentifikasi lokasi pengembangan bahan bakar nabati (*bioethanol-sorgum*) dalam kerangka pengembangan kebun energi terintegrasi dengan peternakan dan proses produksi bioenergi (*biogas-bioethanol-wood pellet*). Dalam survei tersebut, ICCTF dan Direktorat ETI juga memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan dan calon penerima manfaat untuk pengembangan bahan bakar nabati.

Selain itu, ICCTF mengadakan diskusi tentang pemanfaatan kompor biomassa dan peluang pemakaian biomassa sebagai energi alternatif dan terbarukan di skala rumah tangga. Diskusi ini menghadirkan narasumber penemu kompor biomassa dari Universitas Brawijaya, Malang. Dari diskusi ini, ICCTF akan menjajaki kemungkinan kerja sama pengembangan kompor biomassa dengan Universitas Brawijaya dan mengembangkan program *wood pellet* yang telah dilaksanakan di Bangkalan, Madura.

1. 3. CALL FOR PROPOSAL 2016

Call for Proposal untuk Program Skala Kecil ICCTF Tahun 2016 dibuka pada periode 24 November-23 Desember 2015 untuk Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), universitas, lembaga penelitian, serta lembaga riset non-pemerintah dengan pengalaman kerja di bidang mitigasi, adaptasi, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Sejak *Call for Proposal* tersebut diumumkan ke publik, antusiasme masyarakat sangat tinggi dan ICCTF telah menerima 366 proposal selama periode pengiriman proposal. Proses seleksi akan terus dilanjutkan hingga para pelaksana Program Skala Kecil terpilih di awal tahun 2016.

I. 4. DUKUNGAN ICCTF TERHADAP NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS (NAMAS)

ICCTF terus menindaklanjuti hasil dari *NAMAs Summit* yang telah dilaksanakan oleh ICCTF, Kementerian PPN/Bappenas, dan didukung oleh GIZ *Indonesia NAMAs Financing Support* (GIZ INFIS) pada bulan September 2014. Bersama dengan GIZ, ICCTF melakukan kajian ulang terhadap 12 proposal untuk melihat tingkat kesiapan implementasi kegiatan. *Engagement* terhadap beberapa sasaran kegiatan dan lembaga sudah dimulai, termasuk ke *NAMA Facility*, *Green Climate Fund* (GCF), *Global Environment Fund* (GEF), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengembangan kapasitas ICCTF terkait dengan NAMAs juga terus dilakukan. Melalui dukungan GIZ INFIS, pertukaran informasi melalui diskusi internal dengan Sekretariat ICCTF dilakukan secara berkelanjutan. ICCTF juga terlibat dalam rapat koordinasi NAMAs yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas di bulan Oktober 2015.

Di tahun 2015, ICCTF dengan dibantu oleh konsultan lokal telah melakukan kajian yang menghasilkan beberapa keluaran, yaitu:

- (a) Dokumen konsep gagasan pengembangan NAMAs dan proposal NAMAs untuk berbagai bidang
- (b) Pedoman pengembangan proposal NAMAs bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, serta Dunia Usaha yang sesuai dengan persyaratan institusi ICCTF
- (c) Pengembangan NAMAs dalam sektor pengelolaan bangunan gedung secara berkelanjutan yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi proposal NAMAs

- (d) Proposal NAMAs dalam sektor pengelolaan sampah perkotaan yang layak untuk dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diukur tingkat pencapaiannya, dilaporkan, dan diverifikasi berdasarkan standar yang berlaku.

1. 5. **IMPACT ASSESSMENT**

Di tahun 2015, ICCTF melaksanakan kegiatan *impact assessment* untuk program dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kesehatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penilaian dampak segera/menengah (*outcome*), dampak jangka panjang (*impact*), dan keberlanjutan program ICCTF dengan Kementerian Fase II periode 2012-2014.

Program “Sustainable Management of Degraded Peatland to Mitigate Green House Gas Emissions and Optimize Crop Productivity”

Pelaksana: Kementerian Pertanian

Program Kementerian Pertanian fase kedua ini telah mampu memberikan tawaran untuk menjawab dua tantangan yang ditemui di pengelolaan lahan gambut selama ini, yakni upaya penurunan emisi GRK dan risiko degradasi lingkungan, serta peningkatan produktivitas tanaman. Program ini juga telah mampu memberikan landasan maupun hasil yang sifatnya tidak berhenti pada saat program ini berakhir, namun memiliki potensi untuk diadopsi, dikembangkan, dan dilanjutkan dalam berbagai bentuk di masa mendatang.

Program ini pun sudah bisa memberikan pencapaian *outcome* melalui intervensinya, yang terlihat dalam durasi satu tahun sesudah program ini berakhir. Namun untuk membuat hasil yang lebih bergaung, sisi diseminasi harus lebih diperkuat dan direncanakan secara lebih sistematis, terutama untuk mendorong aksi adopsi dalam skala yang lebih luas dan perubahan kebijakan dalam berbagai tingkatan.

Program “Enhancing Sustainable Management of Community-Based Wood Pellets Production as Biomass Energy to Support Low Carbon Economy and Climate Change Mitigation in Bangkalan, Madura, East Java”

Pelaksana: Kementerian Kehutanan

Evaluasi terhadap program ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program. Usaha pengolahan kayu dari tanaman kaliandra menjadi *wood pellet* sebagai sumber energi biomassa masih menjadi agenda

bersama bagi para penerima manfaat program. Selain berpotensi sebagai tambahan pemasukan bagi warga, program ini juga turut meningkatkan kapasitas ekosistem di Bangkalan, Madura, sebagai area endaman karbon.

Hasil survei di lapangan menunjukkan dua jenis manfaat yang didapat oleh masyarakat. Pertama adalah manfaat yang bersifat aktual dan kedua adalah manfaat potensial. Manfaat aktual yang diterima masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat akan cara berbudidaya tanaman kaliandra serta kesadaran berhutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan pemahaman terkait pengembangan usaha dari hasil sektor hutan di wilayah setempat. Sedangkan yang termasuk dalam manfaat potensial adalah hasil produksi *wood pellet* yang dapat berkontribusi positif terhadap bertambahnya sumber penghasilan masyarakat setempat.

Program “Health Vulnerability: Assessment, Mapping, and Community Based Adaptation on Dengue Hemorrhagic Fever and Malaria Diseases”

Pelaksana: Kementerian Kesehatan

Keberhasilan program ICCTF dengan Kementerian Kesehatan terjadi pada dua tingkat, yaitu Dinas Kesehatan Kota dan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan replikasi metode PACT pada salah satu kelurahan yang memiliki kasus Demam Berdarah tinggi, yaitu Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Replikasi skala kecil ini dilakukan pada Bidang Pemberantasan Penyakit dengan pembiayaan APBD rutin dan dibantu oleh tenaga konsultan dalam melakukan pendampingan dan monitoring. Keberhasilan lain program juga tampak dalam peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pembenahan saluran drainase untuk mengurangi perindukan sarang nyamuk. Dampak program ini terjadi pada pelaksanaan strategi Adaptasi Perubahan Iklim (API) baik pada replikasi maupun perilaku di masyarakat.

Berdasarkan indikator pada kerangka logis, ketidakberhasilan program ditemukan pada tidak tercapainya tujuan akhir (*goal*) program. Dampak program belum menghasilkan kebijakan atau peraturan daerah terkait strategi adaptasi perubahan iklim, khususnya di lokasi pilot. Belum tercapainya tujuan akhir program ini dapat disebabkan oleh alat verifikasi untuk mengukur tercapainya tujuan akhir yang dinilai cukup ambisius.

Secara keseluruhan, program ini dinilai relevan, bermanfaat, mendapat partisipasi masyarakat yang cukup baik, dan selaras dalam pelaksanaannya. Namun demikian, program belum dilaksanakan secara efisien dan efektif

dalam mencapai tujuan akhirnya. Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi titik krusial karena belum dipersiapkan dengan matang karena kurangnya pendampingan dan pemantauan paska kegiatan pemicuan dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Posisi *Project Board* termasuk ICCTF memegang peran dan fungsi penting dalam tata kelola dan kendali kualitas program. Sebagaimana tertulis dalam SOP, tugas *Project Board* adalah memberikan persetujuan atas perubahan metodologi, persetujuan atas perubahan *Annual Work Plan* (AWP), dan perpanjangan atau penghentian program.

1.6. GENDER MAINSTREAMING

Politeknik ATMI Surakarta

Program yang dilaksanakan oleh Politeknik ATMI Surakarta telah membuka kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mendapat akses menuju manfaat program. Tim Politeknik ATMI Surakarta menyatakan akan mendukung secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 sebagai langkah awal mengubah ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia.

LPPM IPB

Dalam budaya orang Sunda, mayoritas penduduk di tempat program LPPM IPB ini dilaksanakan, terdapat pembagian peran dan tugas dalam keluarga ataupun komunitas. Misalnya perempuan akan lebih berperan dalam beternak kambing dan lebah, sedangkan laki-laki akan terlibat dalam pengembangan demplot dan penanaman kaliandra.



2. FUNDRAISING DAN KOMUNIKASI

2.1. MEDIA ENGAGEMENT

2.1.1. ICCTF Media Award 2015



ICCTF kembali menyelenggarakan kompetisi jurnalistik, ICCTF Media Award, yang ketiga di bulan September-Oktober 2015. Kegiatan kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi media massa dan masyarakat dalam penyebaran pembelajaran dan informasi mengenai perubahan iklim. Di tahun 2015, ICCTF Media Award memiliki tema “Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia” serta dibuka untuk para awak media dan publik. ICCTF telah menerima sebanyak 56 karya jurnalistik, baik dalam bentuk liputan tertulis, audio, visual, maupun audio-visual dari para peserta dengan latar belakang yang beragam, mulai dari jurnalis hingga blogger, dari berbagai kota di Indonesia

Karya-karya yang masuk ke ICCTF tersebut kemudian diseleksi oleh para juri, yaitu Ibu Wahyuningsih Darajati (Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF); Bapak Prof. Jatna Supriatna (Director *Research Center for Climate Change* Universitas Indonesia dan anggota MWA ICCTF); serta Bapak Untung Widyanto (jurnalis senior *Tempo*). Para juri memilih tiga karya jurnalistik terbaik yang berhasil mengilustrasikan tema ICCTF *Media Award* 2015 dengan tepat, yaitu Siti Retno Wulandari

dari *Media Indonesia* dengan karyanya “Tekan Polusi di Kota Angkot”, Ari Faturrokhmah dari *RRI* dengan karyanya “Langkah Tepat Ubah Adat”, dan Amri Mahbub dari *Tempo* dengan karyanya “Rumput Laut Pemantik Listrik”.

Tiga pemenang ICCTF *Media Award* 2015 mendapatkan hadiah perjalanan ke Paris, Prancis, untuk meliput *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) *Conference of the Parties* (COP) ke-21 pada akhir November 2015. Konferensi tersebut merupakan forum penting bagi Indonesia dan dunia dalam meneruskan aksi penanganan perubahan iklim secara nasional dan global. Hadiah perjalanan tersebut terselenggara atas dukungan dari GIZ INFIS.

2.1. 2. Kunjungan Ke BMKG

Untuk meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai perubahan iklim secara ilmiah dan menyeluruh, ICCTF mengadakan kegiatan kunjungan media ke Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta, pada tanggal 16 September 2015. Selain berdiskusi dengan ICCTF dan BMKG, para jurnalis juga dapat melihat langsung ruang operasional sistem peringatan dini terkait klimatologi, meteorologi, dan geofisika BMKG sehingga mereka memiliki pemahaman ilmiah dalam melakukan peliputan.

Kegiatan ini diikuti oleh para jurnalis dari *Antara*, *BeritaSatu TV*, *CNN Indonesia*, *Rappler Indonesia*, dan *Mongabay*. Antusias media sangat tinggi saat melakukan kunjungan ke ruang-ruang operasional tersebut. Selain melakukan liputan untuk ditayangkan di media, para jurnalis juga memberikan informasi mengenai kunjungan tersebut di media sosial mereka.

2.1. 3. *Media Gathering*

Sebagai bagian dari kegiatan *media engagement* lembaga, ICCTF mengadakan acara diskusi dengan para jurnalis untuk membahas berbagai isu yang sedang hangat di akhir tahun 2015, seperti tindak lanjut COP 21, pendanaan perubahan iklim di Indonesia, dan kelembagaan ICCTF. Acara ini dihadiri oleh para jurnalis dari *Antara*, *Tempo*, *Jakarta Post*, *Jakarta Globe*, *Mongabay*, dan *Media Indonesia* yang juga memberikan *insight* mengenai posisi media dan mekanisme peliputan perubahan iklim di Indonesia.

2. 2. PARTISIPASI DALAM ACARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dengan partisipasi aktif ICCTF di kegiatan-kegiatan perubahan iklim nasional dan internasional, ICCTF semakin memposisikan diri sebagai lembaga dana perwalian yang berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim nasional

dan global. Keikutsertaan ini semakin memperkenalkan *brand* lembaga ICCTF kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas sehingga akan semakin memperlancar peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi semua pihak dalam penanganan perubahan iklim.

2.2.1. *The 5th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo*

Tujuan kegiatan *The 5th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo* yang diadakan di Jakarta, 14-17 Mei 2015, adalah untuk mempromosikan strategi rendah emisi yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan sekaligus menjadi wadah bertukar informasi mengenai berbagai kerja sama yang ada. Komponen pameran menampilkan informasi dan edukasi program-program nasional penurunan emisi gas rumah kaca serta adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan nasional. Dalam kegiatan ini, ICCTF memberikan materi komunikasi mengenai perubahan iklim yang telah diproduksi kepada para pengunjung yang antusias mencari tahu mengenai cara penanganannya.

2.2.2. *Asia Pacific Climate Financing Week*

ICCTF berpartisipasi dalam *Asia-Pacific Climate Financing Week* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan UNDP di Jakarta, 1-3 September 2015. ICCTF menampilkan informasi program yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir di dalam *booth* di area pameran. Para peserta dari negara-negara Asia-Pasifik saling berdiskusi dan mencari tahu mengenai program lembaga di masing-masing *booth*, termasuk *booth* ICCTF yang ramai dikunjungi oleh lembaga dana perwalian dari negara-negara lain.

2.2.3. *Indonesia Climate Week*

ICCTF memberikan dukungan pendanaan terhadap kegiatan *Indonesia Climate Week* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan *Indonesia Climate Alliance* (ICA) di Jakarta, 6-9 Oktober 2015. Dalam acara ini, berbagai pihak yang bergerak di bidang perubahan iklim dari seluruh Indonesia mengikuti serangkaian acara seminar, lokakarya, dialog, pameran, dan kunjungan lapangan.

2.2.4. *Conference of the Parties COP 21/CMP 11*

Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF berpartisipasi dalam UNFCCC COP 21/CMP 11 yang berlangsung di Paris, Prancis, 30 November-11 Desember 2015. Dalam forum dunia tahunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF menyelenggarakan dua diskusi panel di Paviliun Indonesia yang



mengambil tema: (i) *Making Green Economy Work: Exploring Potential Mitigation Actions in Indonesia*; (ii) *Raising Public Awareness of Climate Change: Spreading the Word through Media*.

Diskusi panel di Paviliun Indonesia dengan tema “*Making Green Economy Work: Exploring Potential Mitigation Actions in Indonesia*” menghadirkan para panelis, yaitu Dr. Helmut Dotzauer (*Program Director of GIZ GE-LAMAI-I/ LAMA-I and GIZ BIOCLIME*), Bapak Rida Mulyana (Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM), Ibu Syamsidar Thamrin (Kasubdit Iklim dan Cuaca Kementerian PPN/Bappenas), Yvo de Boer (*Director-General of the Global Green Growth Institute*), Dr. Sonya Dewi (*Indonesia Country Coordinator and Senior Landscape Ecologist of World Agroforestry Centre*), dan Jean-Claude Pires (*Deputy Director of AFD Department for Asia*).

Sementara, diskusi panel “*Raising Public Awareness of Climate Change: Spreading the Word through Media*” menghadirkan narasumber Megan Rowling (jurnalis Thomson Reuters); Untung Widyanto (jurnalis senior *Tempo* dan *Fellow Climate Change Media Partnership*), serta Ari Faturokhmah-RRI, Amri Mahmud-*Tempo*, dan Siti Retno Wulandari-*Media Indonesia* (para pemenang ICCTF *Media Award* 2015). Kegiatan-kegiatan ini mendapatkan tanggapan yang baik dari para pengunjung, termasuk delegasi negara lain yang hadir di acara tersebut.

2. 3. KUNJUNGAN DONOR, MEDIA, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

2.3.1. Kunjungan ke Lokasi Program Skala Kecil Lembaga Arupa di Yogyakarta

Pada tanggal 11-13 Juni 2015, ICCTF menyelenggarakan kegiatan kunjungan donor, media, dan pemangku kepentingan ke lokasi Program Hibah Skala Kecil Lembaga Arupa di Yogyakarta, yang didanai pada tahun 2014 melalui PREP-ICCTF. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan lembaga mitra pembangunan (USAID, GIZ INFIS, GIZ PAKLIM, dan CDKN), serta media lokal dan nasional (*RRI*, *BeritaSatu.com*, *Daai TV*, dan *Mongabay*).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada donor, media, dan pemangku kepentingan tentang keberhasilan program yang didanai ICCTF di Desa Terong, Yogyakarta. Warga di Desa Terong, dengan dukungan dari ICCTF dan Arupa, telah berhasil menanam lebih dari lima ribu pohon jati dan durian di area seluas 312,32 hektar, mengembangkan lembaga keuangan mikro, dan membuat perencanaan program biogas untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan limbah ternak

2.3.2. Kunjungan ke Lokasi Program Skala Kecil Politeknik ATMI di Surakarta, Jawa Tengah

Sebagai kelanjutan dari program penghematan energi di Surakarta, pada tanggal 19 Agustus 2015, ICCTF melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan pengembangan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan wisata di Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh ICCTF dan Politeknik ATMI Surakarta. Program yang dikembangkan ini berupa perangkat lunak untuk mengumpulkan data jumlah listrik yang digunakan di daerah tertentu.

Selama kunjungan ke lokasi program, tim dari Politeknik ATMI Surakarta, ICCTF, dan Kementerian PPN/Bappenas memeriksa keadaan PJU di sekitar Kompleks Candi Sukuh sebelum survei pemetaan dilaksanakan. Diharapkan, dengan efisiensi biaya listrik dari program ini, keadaan PJU yang pada saat survei sangat tidak memadai dapat ditingkatkan, terutama untuk pariwisata.

2.3.3. Kunjungan ke Lokasi Program Skala Kecil Pilar Indonesia di Deli Serdang, Sumatera Utara

Dalam rangka membangun pengetahuan terhadap program adaptasi dan ketahanan, ICCTF mengadakan kegiatan kunjungan ke lokasi program ICCTF dan Pilar Indonesia di Desa Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 11-13 November 2015. Kegiatan ini diikuti oleh Prof. Jatna Supriatna

(anggota MWA ICCTF), perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan lembaga mitra pembangunan (GIZ INFIS, GIZ PAKLIM, dan CDKN), perwakilan lembaga pemangku kepentingan (BMKG, Bank Mandiri, dan politisi muda mitra *Indonesia Youth Team for Climate Change*), serta media lokal dan nasional (*Antara*, *Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Mongabay*, *Harian Analisa*, *Sumut Pos*, *Tribun Medan*, *Medan Bisnis*, *Waspada Online*, dan *Radio SAR FM Sergai*).

Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh ICCTF dan Pilar Indonesia, termasuk membuat produk olahan *mangrove*, memperkuat ekonomi masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan hasil *mangrove* untuk diolah dan dijual. Dalam kegiatan ini, para peserta melihat langsung lokasi konservasi ekosistem, mencicipi produk olahan *mangrove*, dan berdiskusi dengan para penerima manfaat, termasuk warga Desa Percut serta siswa dari MAN 1 Medan dan Madrasah Aliah PAB Sampali.

2. 4. DISKUSI MENGENAI PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

ICCTF dengan dukungan GIZ INFIS mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Mobilisasi Pendanaan Perubahan Iklim dan Kelembagaannya” di Jakarta, pada tanggal 26 November 2015. Para pembicara yang hadir memimpin pembahasan tema tersebut adalah Bapak Sarwono Kusumaatmadja (Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim), Bapak Ismid Hadad (*Chair of Governing Board* KEHATI), serta Bapak Kurniawan Ariadi (Kepala Sub-Direktorat Pendanaan Bilateral Asia Kementerian PPN/Bappenas).

Acara tersebut juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pendanaan dan/atau perubahan iklim, termasuk dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, REDD+ Management Agency, ICED USAID, KEHATI, serta media. Dari diskusi FGD tersebut, ICCTF mendapat banyak masukan untuk pengembangan kelembagaan pendanaan perubahan iklim. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan para peserta FGD ini, yaitu:

1. Dibutuhkan revisi *blue print* ICCTF terkait dengan bentuk institusi dan strategi bisnis. Dalam revisi ini, ICCTF dapat berkonsultasi dengan mitra pembangunan, seperti GIZ INFIS dan ICED USAID.
2. ICCTF diharapkan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan peran dan kapabilitas lembaga, termasuk penyesuaian institusi, regulasi, dan kapasitas SDM.
3. Bentuk kerja sama di masa mendatang tidak hanya berbentuk pendanaan namun juga dalam bentuk kerja sama program, terutama dengan sektor swasta.

3. KEMITRAAN

Peran ICCTF sebagai lembaga dana perwalian untuk kegiatan penanganan perubahan iklim di Indonesia adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan pendanaan dari berbagai macam sumber, termasuk penyandang dana internasional, pendanaan iklim multilateral, dan juga dari Pemerintah Indonesia. ICCTF terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam menjalankan perannya tersebut, termasuk dengan mitra pembangunan dan mitra dunia usaha.

USAID

ICCTF mendapatkan dukungan dana dari USAID sejumlah USD 5 juta untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi. Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam pertemuan MWA ICCTF pada tanggal 19 Juni 2015. Dukungan ini akan mendanai program-program perubahan iklim yang dijalankan oleh entitas non-pemerintah.

Kedutaan Besar Kerajaan Denmark

Kedutaan Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia memberikan dukungan dana kepada ICCTF melalui *Environment Support Program Phase III* (ESP3) dan DANIDA yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pertimbangan lingkungan dan metode.

United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU)

UKCCU memberikan dukungan dana kepada ICCTF sebesar GBP 3 juta untuk kegiatan mitigasi berbasis lahan. Serangkaian pertemuan koordinasi dan lokakarya telah diselenggarakan di tahun 2015, termasuk lokakarya penyusunan proposal dan diskusi untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan proposal dengan Kementerian PPN/Bappenas dan UKCCU.

The Climate Development and Knowledge Network (CDKN)

Di tahun 2015, CDKN memberikan dukungan teknis kepada ICCTF melalui *Æquilibrium Consulting GmbH*. Dukungan teknis ini diberikan untuk menyiapkan ICCTF dalam mengakses dana perubahan iklim global sebagai *National Implementing Entity* (NIE), khususnya *Green Climate Fund* (GCF), dan dapat beroperasi dengan standar internasional pengelolaan pendanaan Perubahan iklim.

ADAPT ASIA

ADAPT Asia Pacific, program regional yang didanai USAID, kembali memberikan bantuan teknis untuk ICCTF di tahun 2015, yang mencakup pengembangan *project pipeline* untuk adaptasi, penyusunan kerangka

monitoring dan seleksi proposal, serta penyusunan dokumen panduan *project cycle management*, dan *environment and social safeguard protocol*.

GIZ INFIS

GIZ INFIS terus memberikan dukungan kepada ICCTF melalui *capacity building* untuk staf ICCTF maupun penguatan organisasi ICCTF, termasuk penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) lembaga. Selain itu, GIZ INFIS juga memfasilitasi kajian-kajian pengembangan peta jalan ICCTF dan tindak lanjut penyusunan peraturan mengenai penyaluran dan penerimaan dana-dana ICCTF, termasuk pengembangan kapasitas ICCTF terkait sistem akuntansi dan penyusunan panduan teknis untuk Program Skala Kecil. GIZ INFIS membantu ICCTF bergerak relatif lebih cepat dalam memfasilitasi pengembangan mekanisme insititusi, terutama dukungan teknis dalam pengajuan aturan baru agar ICCTF dapat berfungsi sebagai lembaga pendanaan perubahan iklim yang berjalan secara efektif dan mampu menyalurkan dana kepada Kementerian/Lembaga dan institusi penerima manfaat lainnya. GIZ INFIS juga mendukung proses penilaian awal terkait dengan persyaratan teknis ICCTF dalam mengakses dana GCF. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan *knowledge management* dan *filing system* pada internal ICCTF yang sejalan dengan upaya ICCTF untuk menjadi NIE.

UNOPS, UNEP DTU Partnership, dan Kementerian Perindustrian

ICCTF membantu memfasilitasi kegiatan “*Technical Assistance from ADMIRE on Cement NAMA: “Reducing Co2 and Closing the Waste Gap: Encouraging Waste-to-Energy in the Indonesian Cement Sector”*” yang merupakan kerja sama antara *United Nations Office for Project Services* (UNOPS), *UNEP DTU Partnership*, dan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi emisi CO₂ dalam industri semen melalui pengurangan konsumsi batu bara dan meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah industri dan *municipal*.

Dunia Usaha

Sepanjang tahun 2015, ICCTF telah mengadakan rangkaian pertemuan dengan *Indonesian Business Council for Sustainable Development* (IBCSO) untuk menjembatani hubungan ICCTF dengan perusahaan-perusahaan anggotanya sesuai diskusi awal dengan KADIN. Selain melakukan pertemuan dengan KADIN, ICCTF juga telah melakukan pembahasan kemungkinan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengeksplorasi program CSR atau mekanisme proporsi kegiatan.

II. PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN KAPASITAS LEMBAGA

1. STATUS LEGAL LEMBAGA

Sekretariat ICCTF berpartisipasi dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta, pada tanggal 11 September 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pengaturan pengelolaan dana hibah yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku otoritas pengelolaan Keuangan Negara (bukan hanya PMK Nomor 252/PMK.05/2014 atau PMK No.190/PMK.05/2011). Perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan paparan singkat tentang perspektif pengelolaan hibah, sistem registrasi hibah, pengelolaan rekening hibah, dan mekanisme lainnya.

Diskusi terbuka ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 3 Juli 2015. APara peserta yang hadir adalah perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, GIZ INFIS, serta konsultan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI).

Dalam diskusi, para peserta membahas posisi ICCTF sebagai Satuan Kerja (Satker) sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45/2013 yang mempunyai keterbatasan hanya bertugas untuk melaksanakan anggaran, sementara pengelolaan dana hibah merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). ICCTF perlu mendorong munculnya solusi yang tepat sehingga peran dan fungsi ICCTF dalam menjalankan mekanisme pendanaan perubahan iklim dapat dijalankan dengan optimal.

2. PERTEMUAN MWA ICCTF

Di tahun 2015, Lembaga Wali Amanat (LWA) ICCTF menyelenggarakan dua pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF, yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan 17 November 2015. Pada pertemuan pertama, ICCTF dan USAID menandatangani perjanjian kerja sama senilai USD 5 juta. Agenda yang dibahas meliputi: (a) informasi perkembangan kebijakan perubahan iklim di

Indonesia periode 2015-2019; (b) dukungan pendanaan baru dari USAID, UKCCU, dan DANIDA; (c) pengenalan Direktur Eksekutif dan Satker MWA ICCTF; (d) presentasi kemajuan dan pencapaian ICCTF, serta persetujuan usulan kegiatan Program Skala Kecil 2015; (e) penandatanganan nota kesepahaman antara ICCTF dan USAID.

Pertemuan MWA yang kedua membahas beberapa agenda, yaitu: (a) informasi perkembangan kebijakan perubahan iklim di Indonesia; (b) pemaparan tindak lanjut pertemuan MWA sebelumnya; (c) keanggotaan baru MWA ICCTF; (d) perkembangan Program Skala Kecil 2015; (e) pemaparan status keuangan 2015; (f) perkembangan rencana ICCTF 2016-2019 dan Rencana Kegiatan Tahunan 2016; (g) *Call for Proposal* 2016.

3. USAID MENJADI ANGGOTA MWA ICCTF

Perwakilan USAID menjadi anggota MWA ICCTF sejak tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2013 tentang pembentukan LWA ICCTF sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 10 Tahun 2014, Pedoman Tata Kelola MWA ICCTF, dan penandatanganan *Program Contribution Agreement, USAID Support for ICCTF 2015-2018* dalam rapat MWA ICCTF pada tanggal 19 Juni 2015, besarnya dana tunai untuk mendukung kegiatan ICCTF (termasuk kontribusi tiga terbesar) dan untuk mengapresiasi komitmen USAID terhadap penanganan perubahan iklim di Indonesia.

4. MANAJEMEN RISIKO

	Penilaian	Strategi Mitigasi
Regulasi		
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011, ICCTF sebagai Lembaga Wali Amanat dapat menyalurkan dana hibah kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah. Namun demikian, dengan terbitnya dua PMK yang tidak/kurang selaras dengan Perpres. No.80/2011, menyebabkan ICCTF mengalami beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan dan ketidakpastian hukum untuk melaksanakan kegiatannya.	Tinggi	ICCTF telah mengusulkan perlunya Peraturan Khusus Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Hibah untuk ICCTF, mengingat belum adanya peraturan lembaga dana perwalian yang memperbolehkan penyaluran dana ke Kementerian/Lembaga lain. ICCTF juga sedang mendiskusikan penyusunan Peraturan Presiden Khusus untuk ICCTF.

Operasional		
• Proses revisi anggaran dari Satker Kementerian PPN/Bappenas ke Satker MWA ICCTF yang cukup panjang. • Pembentukan Satker baru yang memakan waktu hingga lima bulan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). • Waktu dimulainya pelaksanaan Program Skala Kecil yang terlambat dan memerlukan proses koordinasi serta konsolidasi yang intensif. • Mobilisasi SDM untuk melaksanakan kegiatan Program Skala Kecil yang tinggi sehingga konsentrasi hanya terpusat pada pelaksanaan kegiatan tersebut	Menengah	Solusi yang diambil: • Penyusunan anggaran dan rencana kerja yang lebih sesuai dengan kondisi SDM yang saat ini masih belum optimal. • Distribusi SDM yang merata ke seluruh kegiatan ICCTF. • Mempercepat proses rekrutmen pengganti staf kunci untuk melakukan supervisi kegiatan ICCTF secara keseluruhan.

5. PERSIAPAN PENDAFTARAN GREEN CLIMATE FUND

Di tahun 2015, ICCTF mendapatkan dukungan dari CDKN dan GIZ INFIS untuk mempersiapkan proses akreditasi ICCTF sebagai *National Implementing Entity* (NIE) untuk *Green Climate Fund* (GCF). CDKN melalui mitra yang terpilih (Æquilibrium Consulting GmbH) membantu melakukan *review* terkait dengan *legal basis, internal control, project management, monitoring & evaluation, fraud control & irregular practices, Environmental Social and Safeguard (ESS), procurement system, dan human resources*. Proses penyiapan ICCTF untuk akreditasi NIE memerlukan perencanaan dan persiapan yang cukup panjang dan proses yang lebih intensif.

6. PENINGKATAN KAPASITAS STAF SEKRETARIAT ICCTF

Di tahun 2015, ICCTF mendapatkan dukungan dari CDKN dan GIZ INFIS untuk mempersiapkan proses akreditasi ICCTF sebagai *National Implementing Entity* (NIE) untuk *Green Climate Fund* (GCF). CDKN melalui mitra yang terpilih (*Æquilibrium Consulting GmbH*) membantu melakukan *review* terkait dengan *legal basis*, *internal control*, *project management*, *monitoring & evaluation*, *fraud control & irregular practices*, *Environmental Social and Safeguard (ESS)*, *procurement system*, dan *human resources*. Proses penyiapan ICCTF untuk akreditasi NIE memerlukan perencanaan dan persiapan yang cukup panjang dan proses yang lebih intensif.

Pada tahun 2015, Sekretariat ICCTF mengadakan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas dengan dukungan dari GIZ INFIS. Kegiatan pengembangan kapasitas internal staf dan kelembagaan ICCTF meliputi:

Pelatihan Singkat mengenai Mekanisme APBN

Pelatihan Mekanisme APBN bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Sekretariat ICCTF dan unit pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker ICCTF. Pelatihan Mekanisme APBN menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran dan Dirjen Penganggaran APBN). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 (Fase I) dan 24 Juni 2015 (Fase II).

Pelatihan Penyaluran Mekanisme Hibah ICCTF

Pelatihan yang dilakukan pada tanggal 1-2 Juli 2015 ini membahas mekanisme penerimaan dan penyaluran Dana Hibah ICCTF ke Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga (swasta, LSM, CSO, dan universitas) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ICCTF akan mekanisme penyaluran dana ke Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, serta meningkatkan pemahaman yang sama atas peran masing-masing unit dalam melaksanakan penyaluran dana ICCTF. Sebagai bentuk tindak lanjut, Sekretariat ICCTF juga menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran mengenai penyusunan laporan keuangan dengan mekanisme APBN dengan melibatkan Biro Keuangan Kementerian PPN/Bappenas dan unit terkait lainnya.

Pelatihan *Climate Finance*

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2015 ini merupakan pengembangan kapasitas bagi ICCTF dan pemangku kepentingan mengenai pendanaan perubahan iklim dan kebijakannya. Dalam pelatihan ini, dibahas mengenai isu perubahan iklim di dunia internasional dan kesiapan suatu negara dalam mengakses pendanaan internasional untuk perubahan iklim. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu pemberi materi juga menyampaikan mengenai perkembangan kebijakan perubahan iklim di Indonesia dan peluang pendanaannya. Selain itu, PT SMI sebagai salah satu lembaga pendanaan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur juga menyampaikan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan perubahan iklim melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Accessing Private Sector Financing for Renewable Energy And Energy Efficiency Projects

Di tahun 2015, ICCTF mengirimkan satu staf untuk mengikuti kegiatan pelatihan “*Accessing Private Sector Financing for Renewable Energy And Energy Efficiency Projects*” yang diselenggarakan oleh GIZ dan Singapore Cooperation Programme. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang tantangan pendanaan iklim utama bagi pemerintah-swasta, perkembangan *United Nations Framework for Climate Change* (UNFCCC) dan *Green Climate Fund* (GCF) serta hubungannya dengan peran keuangan swasta, peran dan inisiatif pihak swasta untuk membiayai program-program di sektor energi terbarukan dan efisiensi energi, serta peran keuangan mikro dalam mitigasi perubahan iklim.

Pertemuan Koordinasi dan *Team Building* Sekretariat ICCTF

Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kelembagaan ICCTF dan pembentukan tim, ICCTF menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan *team building* yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada bulan November 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan pemahaman yang sama di antara staf Sekretariat ICCTF dan para pemangku kepentingan. Dalam rangkaian acara, para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Yayasan Lengis Hijau untuk komparasi pelaksanaan kegiatan pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dengan program serupa yang dilaksanakan oleh ICCTF dan Konphalindo di Jakarta.

7. JOINT REVIEW ATAS SATKER MWA ICCTF

Joint Review atas Satker MWA ICCTF dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal, tata kelola (*governance*) ICCTF, dan kepatuhan Satker MWA ICCTF terhadap manual operasi lembaga, peraturan, dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan. *Joint review* tersebut menghasilkan keputusan memuaskan.

III. INFORMASI KEUANGAN

Untuk kegiatan penanganan perubahan iklim dan kesekretariatan di tahun 2015, ICCTF menerima dana dari beberapa sumber, yaitu APBN dan *Danish International Development Agency* (DANIDA) Fase I, dengan total sekitar Rp 15,98 triliun. Selain itu, ICCTF juga telah menerima dana atau sudah mulai proses penerimaan dana dari sumber dana yang lain untuk kegiatan setelah tahun 2015, yaitu dari DANIDA Fase II dan USAID. Rincian dana dan penggunaannya sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Dana yang Diterima	Dana yang Digunakan (per 31 Desember 2015)	Capaian	Penggunaan
	APBN	IDR 15.300.000.000	IDR 13.691.791.810	89.49 %	• Program Skala Kecil • Kegiatan Komunikasi Perubahan Iklim • Pengembangan <i>Project Pipeline</i> • <i>Project Impact Assessment</i> • Penguatan Kapasitas ICCTF • Dukungan Sekretariat RAN-GRK dan Sekretariat RAN-API • Dukungan Operasional Sekretariat ICCTF
	DANIDA	<u>Fase I (diterima Desember 2014):</u> DKK 350.000 (IDR 687.000.000)	IDR 687.000.000	100 %	• Pengembangan Area Fokus • Kegiatan Komunikasi Perubahan Iklim (termasuk Forum Perubahan Iklim) • Penguatan Kapasitas ICCTF • Dukungan Operasional Sekretariat ICCTF
		<u>Fase II (diterima Januari 2016):</u> DKK 1.150.000 (IDR 2.320.312.622)	-	-	-
	USAID	USD 5.000.000 (IDR 70.275.000.000)	-	< 1%	Akan digunakan untuk program penanganan perubahan iklim di tahun 2016-2018 melalui <i>Call for Proposal</i>

IV. RENCANA KE DEPAN

Selama program PREP-ICCTF di periode tahun 2010-2014, ICCTF telah memperkuat kerangka institusional dan menjadi mekanisme pendanaan yang sah untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekonomi yang rendah karbon. Dalam proses penguatan kelembagaannya, ICCTF telah menjadi lembaga pembiayaan program penanganan perubahan iklim utama di Indonesia yang diakui pada tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.

ICCTF menyadari pentingnya peta jalan untuk melangkah ke masa depan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan selaras dengan prioritas nasional, ICCTF telah mengembangkan Rencana Bisnis yang mencakup target, strategi investasi, program prioritas, dan kegiatan yang diusulkan dengan anggaran yang direncanakan.

Enam program percontohan berupa Program Skala Kecil yang didanai dengan Rupiah Murni kembali dilaksanakan di tahun 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan area fokus ICCTF, yaitu program untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan perlindungan dan rehabilitasi lahan kritis dan terdegradasi dan zona penyangga di dekat taman nasional (Mitigasi Berbasis Lahan), program percontohan yang membantu meningkatkan efisiensi energi dan mengembangkan langkah-langkah konservasi energi (Energi), serta program untuk meningkatkan kesadaran tantangan perubahan iklim di antara masyarakat lokal dari petani dan nelayan dan membantu memperkenalkan tindakan praktis dan tepat yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (Ketahanan dan Adaptasi).

Walaupun semua transisi pasti memiliki tantangan, termasuk ICCTF yang telah bertransformasi menjadi lembaga dana perwalian nasional, ICCTF perlu untuk menghadapi tantangan perubahan ini untuk lebih meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Langkah di 2016 yang akan difokuskan oleh ICCTF, meliputi hal berikut:

1. ICCTF akan terus memfokuskan diri pada pengembangan kerja sama pemerintah dengan dan mitra pelaksana. Hubungan ini akan menjadi landasan bagi lembaga dana perwalian nasional yang kokoh.

2. ICCTF lebih lanjut akan mengembangkan sistem manajemen, prosedur, dan mekanisme, termasuk audit oleh auditor independen eksternal. Ini adalah perbaikan strategis penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa program yang didanai oleh ICCTF memenuhi standar yang diakui secara internasional dan sesuai dengan prinsip transparansi.
3. ICCTF akan terus memperkuat tiga area fokus dan memperluas kesempatan untuk menjadi lembaga pelaksana program ICCTF kepada lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, universitas, pemerintah daerah, dan swasta.
4. ICCTF lebih lanjut akan mengembangkan sistem manajemen, implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), prosedur, dan mekanisme, termasuk audit oleh auditor independen eksternal.



LAMPIRAN

Lampiran 1

PROGRAM YANG DIDANAI ICCTF 2015

No	Nama Program	Lokasi	Nilai Program (USD)	Periode	Pelaksana	Area Fokus
1.	Pengembangan <i>Mangrove</i> untuk Ketahanan Ekologi-Ekonomi Masyarakat Pesisir	Deli Serdang, Sumatera Utara	44.400	Agustus-Desember 2015	Pilar Indonesia	Adaptasi dan Ketangguhan
2.	Pengembangan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum/ <i>Smart Street Lighting</i> di Kawasan Pariwisata Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	37.000	Agustus-Desember 2015	Politeknik ATMI Surakarta	Energi
3.	Kajian Pengembangan Energi Nabati (Minyak Jelantah) Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan	Jagakarsa, Jakarta Selatan	37.000	Agustus-Desember 2015	Konphalindo	Energi
4.	Pengembangan Model Bisnis Ekowisata di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai	Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	37.000	Agustus-Desember 2015	Balai Taman Nasional Gunung Ciremai	Mitigasi Berbasis Lahan
5.	Pengembangan Model Percontohan Kebun Energi Terpadu di Lahan Kritis untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat dan Mitigasi Perubahan Iklim	Kecamatan Cidolog, Sukabumi, Jawa Barat	37.000	Agustus-Desember 2015	LPPM IPB	Mitigasi Berbasis Lahan
6.	Pengurangan Risiko Iklim dengan Informasi Cuaca untuk Masyarakat Pesisir	Yogyakarta dan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	29.000	Agustus-Desember 2015	Perkumpulan Bingkai	Adaptasi dan Ketangguhan

Lampiran 2

PEMBERITAAN MENGENAI ICCTF


TEMPO

<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/30/206662398/memanen-kaliandra-menjadi-energi-baru>

Memanen Kaliandra Menjadi Energi Baru

30 April 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha wood pellet dari Jepang itu tiba di Pondok Pesantren Darul Ittihad sesuai azan Dhuhur. Awalnya menawarkan diri menjadi investor pabrik wood pellet yang dikelola pesantren yang terletak di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura. "Saya katakan sudah ada BUMN yang lebih dulu menjalin ikatan bisnis dengan kami," kata Kiai Haji Irham Rofii, pimpinan pondok pesantren melalui sambungan telepon kepada Tempo, Rabu, 29 April 2015. Pengusaha Negeri Matahari Terbit kemudian mengusulkan kepada Pak Kiai Irham untuk membangun pabrik wood pellet di kecamatan atau kabupaten lain di Madura. Irham menjelaskan banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang tertarik berbisnis dengannya. Ada yang ingin membeli wood pellet, banyak pula yang mengajak kerja sama bisnis

pellet. Wood pellet seukuran jari kelingking adalah bahan bakar biomassa. Ibu rumah tangga dapat menggunakannya untuk memasak dengan kompor khusus. Bahan ini juga sebagai pengganti batu bara di pabrik atau pembangkit listrik. Di negara subtropis, seperti di Korea Selatan dan Jepang, wood pellet dipakai untuk bahan bakar mesin pemanas ruangan. Di Bangkalan, bahan membuat wood pellet berasal dari batang pohon kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Sejak dua tahun lalu warga sepakat membuat program kebun energi kaliandra di hutan desa seluas 214 hektar dan pabrik wood pellet. Setelah batang kaliandra dipotong-potong, mesin seharga Rp 1,2 miliar yang ada di pesantren lantas mengolahnya menjadi pellet.

Pabrik wood pellet yang berdiri tahun lalu ini merupakan bantuan dari Indonesia Climate

Change Trust Fund (ICCTF), lembaga yang awalnya dibentuk Bappenas. Mereka bekerja sama dengan Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan. Program ini adalah contoh aktivitas mitigasi perubahan iklim, perbaikan lingkungan, dan penguatan sosial-ekonomi penduduk desa.

Kaliandra sengaja dipilih karena cepat tumbuh di lahan miskin hara, miskin air, dan menghasilkan kalori yang tinggi jika dibakar. Selain itu pohon perdu ini dapat ditanam di sela-sela pohon jati milik warga dan daunnya digunakan untuk makanan sapi atau kambing. Pesantren membeli potongan kaliandra milik warga dengan harga Rp 550.000 untuk setiap pickup mobil. “Ini tambahan pemasukan kami,” kata Mohammad Sahrulan kepada Tempo yang meliput program wood pellet di Bangkalan pada Juni 2014. Sahrulan memiliki lahan seluas seluas 20 hektare yang ditumbuhi pohon jati, akasia, melandingan, kaliandra dan lainnya. Ketika uji coba Juni tahun lalu, dalam satu jam, mesin di Desa Kombangan ini mampu menghasilkan 1 ton wood pellet atau 220 ton per bulan.

Saat ini pabrik berhenti beroperasi menunggu perbaikan mesin. Pesantren juga menunggu surat serah terima pengelolaan pabrik dari Kementerian Kehutanan ke pesantren. Jika urusan ini selesai, kata Irham, perusahaan BUMN yang menjadi investor baru akan menambah satu mesin baru lagi. Irham menjelaskan dalam satu bulan pabriknya siap membuat wood pellet sebanyak 200 ton. Harganya Rp 1.500 tiap kilogram sehingga Irham akan mendapat pemasukan Rp 300 juta sebulan. Biaya operasional per bulan tidak sampai Rp 100 juta, berupa gaji tujuh pegawai, membeli bahan baku batang kaliandra dari warga, listrik dan pemeliharaan mesin. Nantinya, perusahaan BUMN itu yang akan memasarkan wood pellet buatan Desa Kombangan. Warga desa sepakat bakal menggunakan biomassa ini untuk memasak. Irham mengatakan peneliti dari Universitas Brawijaya, Malang telah membuat

prototipe kompor berbahan bakar wood pellet. Harga kompor untuk ukuran 1 kilogram sebesar Rp 180.000 dan ukuran 3 kilogram seharga Rp 280.000. Irham dan warga desa pernah melakukan uji coba dimana 1 kilogram pellet menghasilkan bara api selama 1,5 jam yang cukup untuk memasak kebutuhan satu rumah tangga. “Lebih murah ketimbang gas elpiji,” ujarnya. Menurut Yanto Santosa, guru besar Fakultas Kehutanan IPB, ada sejumlah kelebihan wood pellet ketimbang bahan bakar lainnya. Pertama, tidak mengemisi gas karbon dioksida (CO₂). Kedua, menggunakan teknologi sederhana dan skala industri kecil. Ketiga, bahan baku biomassa tersedia di mana saja di Indonesia. Mulai dari tanaman perdu, ampas tebu, sawit, merang, serbuk gergaji, hingga limbah lainnya.

Syamsidar Thamrin, Kepala Sekretariat ICCTF, menjelaskan program energi terbarukan di Bangkalan ini menjadi penyumbang signifikan program rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca di Jawa Timur. “Kita bisa menghitung karbon yang diserap di area kebun energi dan simpanan karbon pada wood pellet sebagai pengganti bahan bakar fosil,” katanya. Sumbangan sektor energi sangat penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% per tahun. Ada 90 % warga kota menikmati listrik, namun hampir setengah penduduk pedesaan tidak memiliki akses listrik dan 42% nya masih memasak menggunakan bahan bakar tradisional, seperti kayu bakar, dedaunan dan kotoran hewan.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan rezim Orde Baru diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Pada tahun 2014, subsidi ini menyumbang lebih dari 20% belanja pemerintah pusat dan lebih menguntungkan warga menengah dan atas yang memiliki kendaraan bermotor. Jumlah subsidi BBM ini tiga kali lebih besar dari anggaran untuk sektor kesehatan atau infrastruktur Selama lima tahun

subsidi BBM di Indonesia mencapai Rp 1.650 triliun. Padahal dana itu bisa untuk program penyediaan listrik, memasak secara bersih dan sehat, peningkatan jalan, sektor kesehatan dan pendidikan. Analisis Copenhagen Consensus Center menyimpulkan jika pemerintah Indonesia mampu membuat kebijakan baru yang menghapus subsidi energi pada 2018 akan memungkinkan 3,3% dari PDB disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Termasuk juga menutupi biaya kesehatan atau member bantuan tunai kepada keluarga miskin. Untuk meminimalkan dampak langsung pada warga miskin, program jaring pengaman sosial membutuhkan biaya sekitar Rp 6.600 miliar setiap tahunnya. “Untuk setiap seribu rupiah biaya yang dikeluarkan bakal mendapat manfaat senilai Rp 16.000,” kata Amy Sopinka, konsultan energy yang menulis kajian untuk Copenhagen Consensus Center dalam seminar bertajuk ‘Agenda Pembangunan Paska-2015’ di Jakarta, 25 Maret 2015.

Sampai tahun lalu, rasio elektrifikasi sebesar 84,12 persen atau sekitar 10 juta rumah tangga belum teraliri listrik. Analisis Copenhagen Consensus Center memaparkan dibutuhkan investasi Rp 5,8 triliun tiap tahun untuk sektor ini. Namun setiap Rp 1.000 pengeluaran akan membawa manfaat Rp 9.300 dan membantu mengubah kehidupan orang-orang miskin di pedesaan. Upaya lain harus dilakukan agar setiap orang memiliki akses kepada fasilitas memasak yang bersih dan sehat. Bank Dunia memperkirakan masih ada 18 juta rumah tangga yang terpapar polusi karena memasak dengan kayu bakar di dapur. Untuk

itu butuh Rp 14 triliun guna menyediakan kompor yang sehat. Wood pellet yang mulai diproduksi Pondok Pesantren Darul Ittihad, Bangkalan, Madura memiliki potensi besar sebagai bahan baku untuk memasak di rumah tangga. Biaya membeli kompornya hanya Rp 180-280.000 dan harga 1 kilogram pellet cuma Rp 1500 untuk memasak selama 1,5 jam.

Pellet juga menjadi bagian dari biomassa yang masuk dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Aturan ini menargetkan penggunaan energi bauran (energy mix) pada tahun 2025, dimana energi terbarukan (biofuel, geothermal, biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya dan angin) diharapkan berkontribusi bagi penyediaan energi nasional hingga 15%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah membuat kajian di tahun 2005, dimana biomassa yang menjadi sumber energi non-fosil kapasitasnya setara dengan 49,81 gigawatt (GW). Angka ini lebih tinggi dari panas bumi yang setara 27,14 GW. Memang kapasitas terpasang biomassa saat ini baru 0,302 GW. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang mencatat, potensi biomassa yang dimiliki Indonesia sanggup menyumbang 50 GW keperluan energi nasional. Potensinya besar, biaya mengolahnya murah dan tidak butuh teknologi tinggi. Potensi itu kini sedang direalisasikan di pabrik pellet milik Pondok Pesantren Darul Ittihad, Bangkalan, Pulau Madura.

Untung Widyanto

BERITA SATU

<http://www.beritasatu.com/lingkungan/282078-sukses-tunda-tebang-desaterong-diharapkan-bisa-jadi-percontohan.html>

Mengelola Hutan Rakyat dalam Menghadapi Perubahan Iklim

15 Juni 2015

Bantul - Sebagai salah satu desa yang sukses mengelola lingkungan hidup, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan mampu menjadi percontohan bagi wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wahyuningsih, dalam acara “Donor dan Media Visit” yang dipusatkan di lokasi yang sama, Jumat (12/6). Menurut dia, kesuksesan itu tak lepas dari peran serta masyarakat yang turun tangan langsung sebagai aktor utama dalam menjaga lingkungan melalui sistem “tunda tebang”.

“Desa ini (Terong) punya warga yang sangat dinamis, saya ingin bisa menjadi salah satu contoh dan mengedukasi wilayah lain. Kesuksesan ‘tunda tebang’ ini juga saya harapkan sekaligus sebagai pilot penyelamatan alam penanggulangan hutan iklim”, katanya. Sistem “tunda tebang” ialah

sebuah gerakan masyarakat untuk menjaga tata ruang wilayah dengan penundaan penebangan pohon yang menjadi salah satu mata pencaharian warga desa Terong. Selama beberapa kurun waktu yang lalu, masyarakat dinilai sia-sia karena menjalankan pemanenan dengan tidak terencana atau “tebang butuh”. Dengan adanya sistem “tebang tunda”, selain akan mendapatkan keuntungan dalam cakupan ekologi, masyarakat juga terbantu dari segi ekonomi. Hasil yang diperoleh dari langkah mitigasi tersebut dikelola oleh sebuah koperasi bernama Koperasi Tunda Tebang (KTH) yang diprakarsai oleh Arupa dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui badan wali amanah Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang bernaung di bawah payung Bappenas, sehingga manfaat bisa dipetik secara langsung oleh masyarakat melalui koperasi tersebut.

Danung Arifin/EPR

The Jakarta Post<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/22/us-contributes-5m-ri-climate-trust-fund.html#sthash.5x5MY4xa.dpuf>

US Contributes \$5m to RI Climate Trust Fund

22 Juni 2015

The US Agency for International Development (USAID) mission director Andrew Sisson on Friday signed an agreement to award US\$5 million to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) it will use to fund Indonesian NGOs' climate change programs. "From changing weather patterns that affect food production, to rising sea levels that increase the risk of coastal flooding, Indonesia faces a wide range of climate change-related threats," Sisson said as he signed the agreement with National Development Planning deputy minister Endah Murniningtyas, who is also ICCTF Board of Trustees chairwoman. "The US is proud to support the ICCTF and continue our history of partnering with the Indonesian government to tackle important global challenges," said the USAID mission director.

He said climate change was a shared global priority that required the action of governments, private companies, NGOs and citizens. "It's

impressive that this fund involves all these stakeholders in Indonesia," Sisson said. ICCTF pools and coordinates funds from various sources to support and finance climate change programs and policies. The ICCTF is one of only two nationally managed trust funds in the world dedicated to fighting climate change, making it a model for many middle-income and developing countries. "This contribution shows that international partners like the US are important in Indonesia's efforts to transition to a low-carbon economy and adapt to climate change," said Murniningtyas. Apart from being a greenhouse gas emitter, Indonesia is among the countries that are most vulnerable to the impacts of climate change. The Asian Development Bank estimates that climate change could cause economic losses of between 2 and 7 percent of annual gross domestic product by the end of the century.

(ebf)

SWA

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/22/us-contributes-5m-ri-climate-trust-fund.html#sthash.5x5MY4xa.dpuf>

Komitmen ICCTF sebagai Institusi Dana Perwalian untuk Perubahan Iklim



Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF, Endah Murniningtyas (kiri) dan Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF, Wahyuningsih Darajati.

8 September 2015

Untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama media dalam mengamati isu lingkungan hidup, ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) menggelar ICCTF Media Award 2015, yang sebelumnya telah diadakan dua kali sejak tahun 2013. ICCTF Media Award 2015 merupakan kompetisi jurnalistik yang bertujuan untuk menggairahkan semangat media dan masyarakat dalam memperhatikan penanganan perubahan iklim, khususnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. Tema tahun ini adalah “Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Endah Murniningtyas, mengungkapkan bahwa media sangat berperan penting dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat luas mengenai isu perubahan iklim. “Upaya penanganan perubahan iklim adalah tanggung jawab kita semua, baik dari Pemerintah, sektor swasta, ataupun publik.

Untuk itu, peran media menjadi sangat signifikan sebagai saluran informasi yang memiliki jangkauan luas terhadap masyarakat, terutama di saat perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap isu perubahan iklim”, kata Endah yang juga merupakan Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF itu.

Endah juga menambahkan isu perubahan iklim belum menjadi fokus utama pemberitaan media. Padahal, berdasarkan perkiraan ilmiah, dampak perubahan iklim menimbulkan ancaman dan tantangan jangka panjang yang signifikan untuk pembangunan di berbagai sektor dan daerah. “Jangkauan informasi yang bisa dicapai media sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya bersama dari semua pihak, terutama di daerah dan dunia usaha”, tambahnya.

ICCTF sebagai institusi dana perwalian untuk perubahan iklim terus berkomitmen dengan menargetkan pengurangan gas rumah kaca (GRK) di tahun 2020 sebesar 26% dengan dana sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Mengingat target ekonomi juga

harus dicapai, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya sinergi antara pertumbuhan ekonomi, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan

iklim, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019.

Putri Wahyuni

Tempo.co

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/14/206718800/icctf-edukasi-nilai-ekonomi-bakau-di-desa-percut>

ICCTF Edukasi Nilai Ekonomi Bakau Di Desa Percut

14 November 2015

TEMPO.CO, Deli Serdang - Indonesia Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mendanai program pengembangan mangrove untuk ketahanan ekologi-ekonomi warga Desa Percut, Deli Serdang. "Kami masuk sejak Juli 2015," kata Erwin Widodo Direktur Eksekutif ICCTF di Medan, Jumat, 13 November 2015. Bersama dengan pendonor dan pejabat Bappenas, dia mengunjungi program itu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam program ini, ICCTF -- lembaga pendanaan di bawah pengawasan Bappenas -- menggandeng Pilar, organisasi masyarakat sipil. Mereka melatih dan mengembangkan manfaat tanaman penyerap karbon tersebut kepada warga yang bertempat tinggal di Desa Percut.

Kawasan pesisir timur Sumatera Utara ini dipilih berdasarkan alasan kerusakan ekologi yang diciptakan oleh aktivitas penyeberangan laut di selat Malaka. "Pergerakan kapal di selat Malaka 2.000 kapal, sebuah penilaian menunjukkan kerusakan banyak terjadi di titik-titik yang pertumbuhan ekonomi berjalan cepat," kata dia. Desa Percut menjadi salah satu sasaran donasi karena dari segi pengetahuan, warga sudah

mengerti dan mengetahui penanaman bakau. "Kami sasar ke penambahan nilai ekonomi dari pemberdayaan mangrove," kata Erwin.

Dengan pemberdayaan manfaat ekonomi, ICCTF berharap program pilot ini bisa segera menunjukkan manfaatnya untuk direplikasi di wilayah lain yang membutuhkan proses sejak nol. Warga Desa Percut Ahmad Sayuti, 39 tahun, mengatakan selama tiga tahun terakhir dirinya mulai beralih profesi menjadi petani pembibitan tanaman bakau. Hal ini dilakukan karena melihat keuntungan nilai ekonomi dari tanaman bakau yang sudah ditanam sejak tahun 1982. "Dari tahun itu kondisi bakau minim, kami sudah mulai tanam, tapi penggunaannya hanya untuk arang atau kayu bahan bangunan rumah." Ia mengaku selama setahun terakhir melalui lembaga Pilar dan ICCTF dirinya beserta warga pesisir lainnya diajari cara memanfaatkan tanaman bakau menjadi penghasilan.

"Dibanding jadi nelayan, penghasilan ini lebih baik, jauh dari nelayan tradisional." Saat musim panen ikan tambak di area bakau penghasilannya bisa mencapai Rp 10 juta lebih," kata dia. Data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tahun 2014 menyebutkan Indonesia memiliki luas hutan

bakau sebesar 3,3 juta hektare. Hutan bakau dapat ditemukan disepanjang pantai pesisir timur Sumatera, pesisir utara Jawa, pesisir Kalimantan, pesisir laut Sulawesi, hingga pesisir selatan Papua.

Kawasan bakau, selain memiliki fungsi penyerapan karbon, juga berguna untuk kawasan

peternakan tambak ikan air laut. Selain itu sejumlah percobaan juga dilakukan terkait pemanfaatan bakau sebagai komoditas makanan.

Maya Nawangwulan



Sekretariat ICCTF
Wisma Bakrie II, 20th Floor,
Jl. H.R Rasuna Said Kav, B-2, Jakarta 12920 -Indonesia
Telp: +62 (21) 5794 5760, Fax: +62(21) 5794 5759
www.icctf.or.id